

# Pendampingan Persiapan dan Implementasi Badan Layanan Umum Daerah

Lingkungan Pemerintah Daerah







## Latar Belakang

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 345 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen publik, salah satunya dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 346).

Dalam Biro Perekonominian Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bagian BUMD dan BLUD turut serta dalam pelaksanaan penerapan BLUD khususnya pada subbagian BLUD dalam bagian BUMD dan BLUD bertindak sebagai koordinator. Aturan ini mengacu kepada Permendagri Nomor 79/2018 tentang BLUD dan Permendagri 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Sesuai dengan lampiran Permendagri No. 56 Tahun 2019, fungsi subbagian BLUD di Biro Perekonominian meliputi:**

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
2. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi Badan Layanan Umum Daerah;
3. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah; dan
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan serta Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah

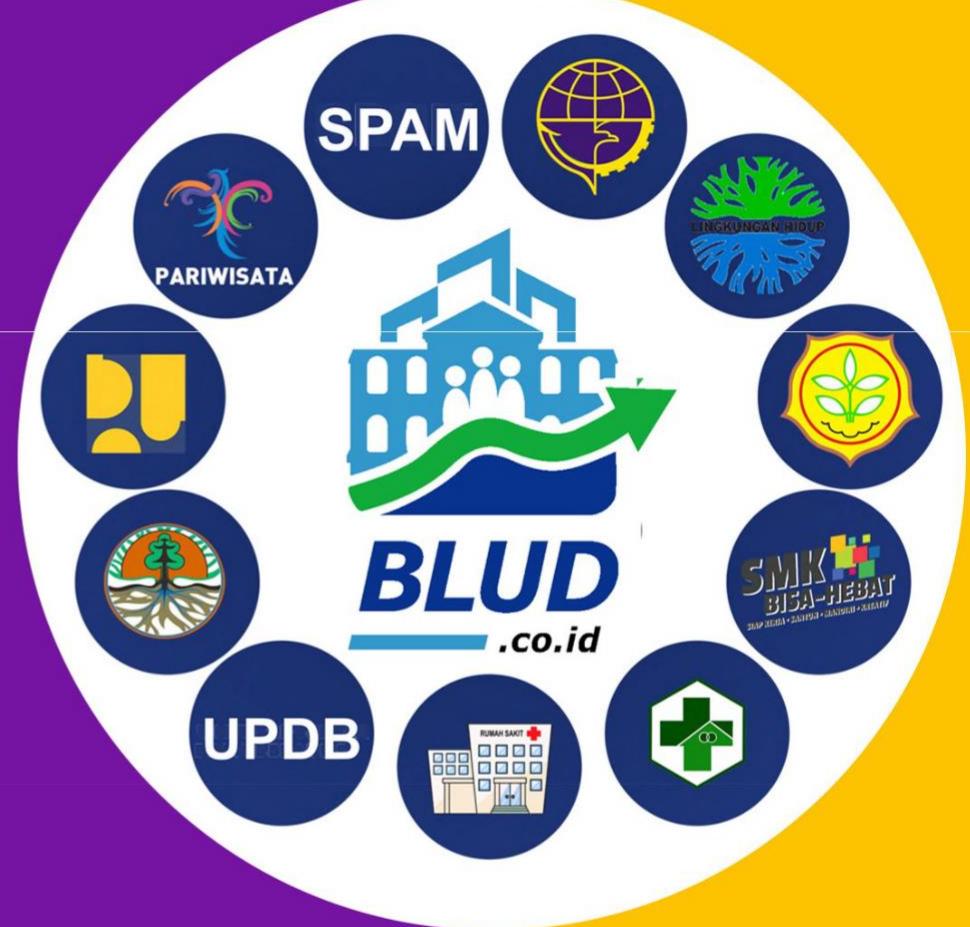
## Mengacu dalam Permendagri 79 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1:

menyatakan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disingkat UPT/D yang telah menerapkan BLUD akan memiliki fleksibilitas sesuai dengan pengertian BLUD menurut Permendagri 79 Tahun 2018.

## UPT/UPTD BLUD di Indonesia meliputi:

- 1. SPAM
- 2. DLH
- 3. Kementerian Pertanian
- 4. SMKN
- 5. Puskesmas
- 6. Rumah Sakit
- 7. UPDB
- 8. Kementerian perhubungan
- 9. Kementerian PUPR
- 10. Pariwisata



Organisasi pemerintah daerah menuntut UPT/D untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dikelola dengan lebih profesional. Sehingga, BLUD menjadi alternatif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas anggaran yang dimiliki BLUD. Dengan demikian, UPT/D atau Badan Daerah yang menerapkan BLUD bisa meningkatkan kualitas pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

## UPT/D atau Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD menurut Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 harus memenuhi persyaratan, antara lain:

Syarat substantif dapat terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum menghasilkan semi barang atau jasa publik.

1

### SYARAT SUBSTANTIF

Persyaratan menjadi BLUD secara teknis terpenuhi apabila:

- o Karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan.
- o Berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.

### SYARAT TEKNIS

2

Persyaratan menjadi BLUD secara administratif terpenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen seperti Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Renstra, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Keuangan atau Prognosis/Proyeksi Keuangan; dan Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia di Audit Oleh Pemeriksa Eksternal Pemerintah.

3

### SYARAT ADMINISTRATIF

## **Permasalahan umum instansi yang belum menerapkan BLUD:**

Banyak UPT/D yang mengalami hambatan dalam hal:

- 1. UPT/D belum memahami langkah-langkah atau tahapan untuk menerapkan BLUD**
- 2. UPT/D belum memahami penyusunan Dokumen Persyaratan Administratif untuk penerapan BLUD yang terdiri dari :**

Standar pelayanan minimal;

Laporan keuangan atau prognosis /proyeksi keuangan; dan

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

**4.**

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;

**5.**

Pola tata kelola;

**1.**

Rencana strategis;

**2.**

**3.**

**3. Pemda**

## **Permasalahan umum instansi yang sudah menerapkan BLUD:**

Banyak UPT/D yang belum memahami bagaimana menerapkan BLUD, hal ini terjadi banyak instansi mengalami kesulitan dalam akuntabilitas dan keuangan BLUD terutama pada permasalahan berikut:

**1.**

Penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

**2.**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban bulanan untuk penerimaan dan pengeluaran BLUD

**3.**

Penyusunan laporan keuangan BLUD

# Solusi Permasalahan BLUD



Berdasarkan permasalahan diatas, UPT/D memerlukan pendampingan dalam menjalankan tahapan persyaratan, permohonan, penilaian dan persetujuan menerapkan BLUD oleh kepala daerah.

Untuk mendukung hal tersebut kami memiliki layanan berupa:

## 1 Pendampingan Persiapan Penerapan BLUD

Pendampingan ini sebagai langkah yang tepat untuk UPT/D dalam menjalankan persiapan penerapan BLUD. Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli yang berpengalaman dalam mendampingi lebih dari 1000 instansi untuk menerapkan BLUD. Melalui pendampingan diharapkan UPT/D dapat memahami persiapan penerapan BLUD sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018. Sehingga kinerja UPT/D menjadi lebih efisien dan efektif.



2

## Penyusunan Persyaratan Penerapan BLUD

UPT/D yang hendak menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memerlukan penyusunan dokumen administratif. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dalam menyusun dokumen administratif. Melalui penyusunan dokumen ini, diharapkan UPT/D mampu menerapkan BLUD sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018. Sehingga kinerja UPT/D menjadi lebih efisien dan efektif.

3

## Pendampingan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

UPT/D yang telah menerapkan BLUD memerlukan pendampingan secara intensif untuk melaksanakan PPK BLUD. Dalam hal ini kami memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan memahami implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Pendampingan ini bertujuan agar instansi UPT/D mampu menyajikan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta dapat diterima oleh BPK.

### Rincian Output Pendampingan

#### Pendampingan

#### Output

**Pendampingan penyusunan rencana bisnis & anggaran**

**Dokumen RBA**

**Pendampingan Penerimaan, Pengeluaran, dan Pembiayaan BLUD**

**Laporan Pertanggung jawaban Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan BLUD**

**Pendampingan penyusunan laporan keuangan BLUD**

**Laporan keuangan sesuai PSAP13**

# Rincian Layanan BLUD

## 1. Rincian Layanan Pendampingan Pra BLUD

Pendampingan  
Selama ± 4 bulan



Untuk menggali  
informasi seputar  
situasi, kondisi dan  
kebutuhan instansi pra  
BLUD

Workshop dilakukan untuk  
memberikan pemahaman  
mengenai pengertian, alur,  
dasar hukum BLUD,  
menjalankan persyaratan  
permohonan, penilaian dan  
penetapan menerapkan BLUD.

PENDAMPINGAN DOKUMEN  
ADMINISTRATIF BLUD

Mendampingi dalam  
penyusunan dokumen  
administratif BLUD yang dibuat  
oleh klien dan tim konsultan  
melakukan penilaian dan  
review dokumen administratif  
maksimal 3x sesuai dengan **SE  
Mendagri No.981 Tahun 2019**.

### Jadwal Workshop

Modul	Hari	PIC/Mentor
Pengantar BLUD & Tata Kelola BLUD	Hari ke-1	
Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA)	Hari ke-2	Tenaga Ahli & Tim Syncore
Alur Penerimaan & Pengeluaran		
Penatausahaan Pejabat Keuangan	Hari ke-3	
Penyusunan Laporan Keuangan		

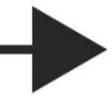
### Output Pendampingan Persiapan Penerapan BLUD :

- 1 Surat Kesanggupan Meningkatkan kinerja
- 2 Surat Bersedia diaudit
- 3 Dokumen Pola Tata Kelola
- 4 Dokumen Standar Pelayanan Minimal
- 5 Dokumen Rencana Strategis
- 6 Laporan Keuangan

# Rincian Layanan BLUD

## 1. Rincian Layanan Pendampingan Pra BLUD

Pendampingan  
Selama ± 4 bulan



**4**

HASIL REVIEW DAN PENILAIAN  
DOKUMEN ADMINISTRATIF  
BLUD

Penyerahan hasil review dan penilaian oleh tim konsultan atas penyusunan dokumen administratif BLUD yang dibuat oleh klien.

**5**

PENDAMPINGAN PENGAJUAN  
PENERAPAN BLUD KE KEPALA  
DAERAH

Sebagai tenaga ahli dalam mendampingi klien untuk mengajukan penerapan BLUD

**Output**  
**Pendampingan**  
**Persiapan Penerapan**  
**BLUD :**

1 Review note

2 Cover Letter

# Rincian Layanan BLUD

## 2. Rincian Layanan Penyusunan Persyaratan Penerapan BLUD

**Penyusunan Dokumen  
Selama ± 4 bulan via online dan offline**



# Rincian Layanan BLUD

## 2. Rincian Layanan Penyusunan Persyaratan Penerapan BLUD

**Penyusunan Dokumen**

**Selama ± 4 bulan via online dan offline**

**4**

**PENDAMPINGAN PENGAJUAN  
PENERAPAN BLUD KE KEPALA DAERAH**

C

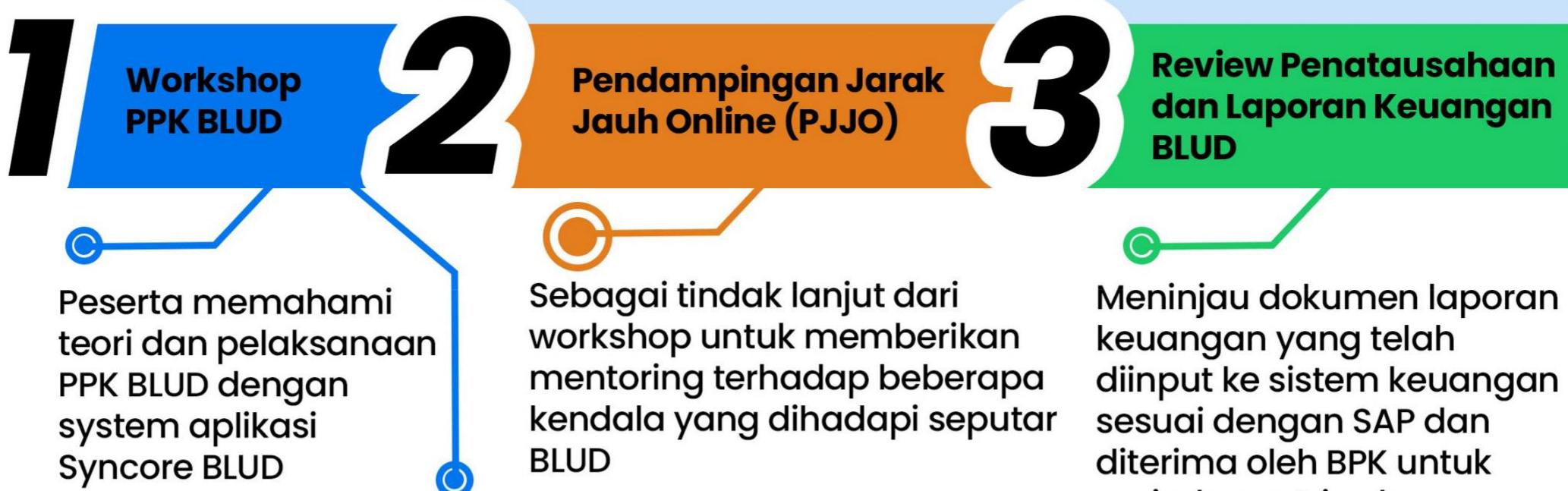
Sebagai tenaga ahli dalam  
mendampingi klien untuk  
mengajukan penerapan  
BLUD

# Rincian Layanan Pra BLUD

## 3. Rincian layanan Pendampingan Implementasi PPK BLUD

### Metode pendampingan Periode 1 tahun

#### **Financial Services Consultant**



#### Jadwal Workshop

Modul	Hari	PIC/Mentor
Pengantar BLUD & Tata Kelola BLUD	Hari ke-1	
Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran (RBA)	Hari ke-2	Tenaga Ahli & Tim Syncore
Alur Penerimaan & Pengeluaran		
Penatausahaan Pejabat Keuangan	Hari ke-3	
Penyusunan Laporan Keuangan		

#### Fasilitas Pendampingan

1. Materi PPK BLUD
2. Trial dan praktik sistem Syncore BLUD
3. Free sistem Syncore BLUD dan konsultasi dengan Financial Services Consultant (FSC)
4. Review penatausahaan per triwulan dan laporan keuangan semesteran maupun tahunan

# Pendampingan PPK BLUD dengan Financial Services Consultant (FSC)



o Syncore BLUD hadir dalam memberikan layanan unggulan yang lebih intensif dengan menyediakan tim khusus dalam pendampingan PPK BLUD melalui Financial Services Consultant (FSC).

o Financial Services Consultant (FSC) berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan seperti pada pemahaman BLUD, kendala sistem aplikasi serta review laporan BLUD secara efektif dan akuntabel. FSC memberikan layanan berupa:

## Layanan Financial Services Consultant (FSC)

1

**Inbond:** tanya jawab seputar permasalahan blud

2

**Outbond:** review inputan system

3

**Review** penatausahaan keuangan (triwulan), laporan keuangan (semesteran dan tahunan)

Untuk memberikan layanan prima, FSC memfasilitasi melalui:

1. Voice: telepon

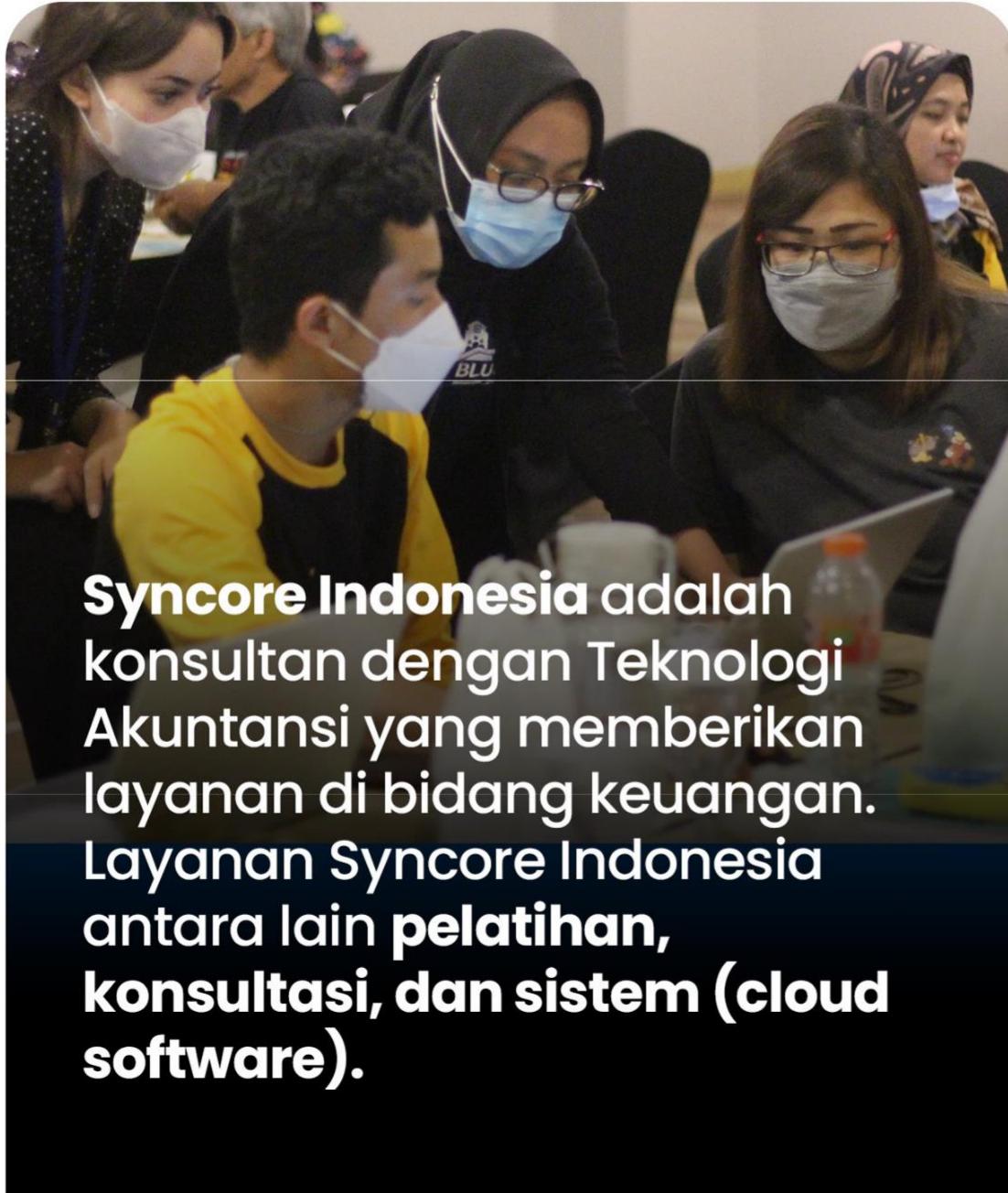
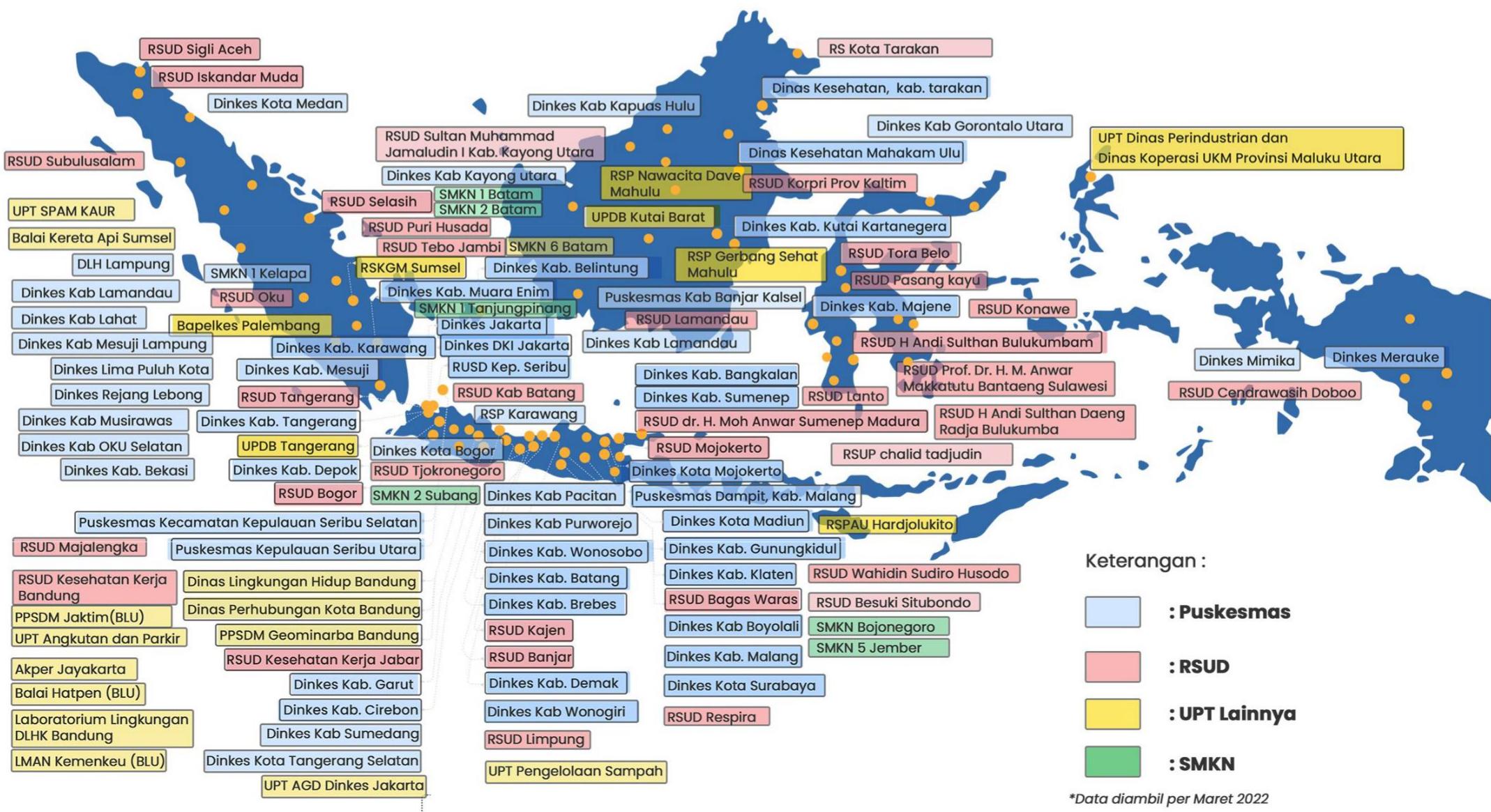
2. Typing: whatsapp dan email

3. Meeting: zoom meeting

# Profile **BLUD**

# Peta Mitra

# Syncore BLUD



**Syncore Indonesia** adalah konsultan dengan Teknologi Akuntansi yang memberikan layanan di bidang keuangan. Layanan Syncore Indonesia antara lain **pelatihan, konsultasi, dan sistem (cloud software)**.

Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli 2010 yang memberikan jasa konsultan manajemen bisnis dan keuangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Syncore Indonesia kini memberikan layanan di bidang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga profesional yang berpengalaman di bidang keuangan, kami telah mendampingi lebih dari 1.100 instansi, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Layanan Umum Daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.



# Narasumber



## Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M, CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi, tenaga ahli serta **narasumber BLUD yang berpengalaman dalam melakukan lebih dari 1000 pelatihan dan pendampingan**. Beliau juga terlibat dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

## Partner Narasumber Dan Praktisi



### Dr Rudy Suryanto, SE, M.Acc., Ak., CA

Dosen Akuntansi  
Universitas  
Muhammadiyah  
Yogyakarta, mantan  
auditor senior,  
berpengalaman lebih 300  
(tiga ratus) pelatihan dan  
pendampingan.

### Andri Yandono, SE, MM

Dewan pengawas RSUD  
Kota Yogyakarta dan  
RSUD Panembahan  
Senopati Bantul, Kepala  
Keuangan RSUD  
Panembahan Senopati  
Bantul, tim penilai BLUD  
Kabupaten Bantul.

### Soni Haksomo, SE, M.Si

Kasubag keuangan  
RSUD Kota Yogyakarta

- **Tim pendamping BLUD Syncore**

# Partner

## PARTNER KAMI



Dinkes Kabupaten Lahat  
Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BEKASI



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan  
Kabupaten Musi Rawas Utara



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN REJANG LEBONG



Dinas Kesehatan  
Kab. Lima Puluh Kota



Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau



PUSKESMAS SURADE  
KABUPATEN SUKABUMI



Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purworejo



DINAS KESEHATAN  
KOTA MEDAN



Dinas Kesehatan  
Kabupaten Banjar



PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS  
KOTA TARAKAN



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WONOGIRI



Dinas  
Kesehatan  
Kabupaten Batang



Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Selatan



UNIT PELAYANAN  
AMBULANS GAWAT DARURAT  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



UNIT PELAYANAN  
AMBULANS GAWAT DARURAT  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



DINAS KOPERINDAG  
KABUPATEN KUTAI BARAT



Lembaga  
Manajemen  
Aset  
Negara



DISHUB  
Kota Bandung



ppsdm  
**GEOMINERBA**

UPT Pengelolaan Sampah  
Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Selatan



# Partner



# Partner

## PARTNER KAMI



Dinas Kesehatan Kabupaten  
Kutai Kartanegara



DINAS KESEHATAN  
KOTA MALANG



DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KOTAMOBAGU



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MADIUN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KULON PROGO



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BENGKALIS



DINAS KESEHATAN  
PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
SUMENEP



DINKES  
KOTA SERANG



Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. H. Marsidi Judono



RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA  
KABUPATEN BULUKUMBA



RSUD MUARADUA  
OKUSELATAN



DINAS KESEHATAN  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KAYONG UTARA



RSUD CENDRAWASIH  
KEPULAUAN ARU

# Partner



RSUD PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT



RSUD LANTO DAENG PASEWANG  
KABUPATEN JANEPOUTO



RSUD KAUR  
KABUPATEN BENGKULU



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
**NURDIN HAMZAH**



DINAS CIPTAKARYA  
MANGGARAI TIMUR



LH Provin si  
**LAMPUNG**

**DisKopUMK**  
Kota Cilegon



Lembaga  
Manajemen  
Aset  
Negara



DINAS KOPERASI DAN UMKM  
KOTA SOLOK